

## **Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar Di Sekolah Dan Perguruan Tinggi**

**Lutvia Faridah<sup>1</sup>, Lukman Nugraha<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Pendidikan Agama Islam, Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

Email: [faridahlutvia@gmail.com](mailto:faridahlutvia@gmail.com)

### **Abstrak**

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam merespons berbagai tantangan pendidikan nasional, khususnya dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan capaian belajar dan meningkatnya kesenjangan pendidikan. Kebijakan ini menekankan fleksibilitas pembelajaran, penyederhanaan konten, penguatan karakter, serta pemanfaatan asesmen diagnostik sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Di tingkat pendidikan tinggi, kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar kontekstual di luar program studi. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dan perguruan tinggi dengan meninjau landasan konseptual, implementasi kebijakan, serta isu-isu pendidikan terkini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21, namun implementasinya masih menghadapi tantangan terkait kesiapan pendidik, pemerataan infrastruktur, serta optimalisasi asesmen diagnostik dalam praktik pembelajaran.

**Kata kunci:** Kurikulum Merdeka, Kebijakan Pendidikan, Asesmen Diagnostik, MBKM.

### **Abstract**

The Independent Learning Curriculum is a strategic policy of the Indonesian government in responding to various national education challenges, especially the impact of the Covid-19 pandemic which has led to a decline in learning outcomes and an increase in education gaps. This policy emphasizes learning flexibility, content simplification, character strengthening, and the use of diagnostic assessments as the basis for learning planning. At the higher education level, the Independent Learning – Independent Campus (MBKM) policy provides space for students to gain contextual learning experiences outside the study program. This aims to analyze the Independent Learning Curriculum policy in schools and universities by reviewing the conceptual foundation, policy implementation, and current education issues. The research method used is a literature study by analyzing books, scientific journal articles, and national education policy documents. The results of the study show that the Independent Learning Curriculum has

strong relevance to the needs of 21st century education, but its implementation still faces challenges related to educator readiness, equitable distribution of infrastructure, and optimization of diagnostic assessments in learning practices. Keywords: Independent Curriculum, Education Policy, Diagnostic Assessment, MBKM.

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan pendidikan memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan sumber daya manusia. Tilaar (2012, hlm. 55–57) kebijakan pendidikan merupakan hasil keputusan politik yang sarat dengan nilai, ideologi, dan kepentingan jangka panjang negara.

Jadi, pandangan ini menegaskan bahwa perubahan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Pandemi Covid-19 telah memperparah persoalan pendidikan di Indonesia.

Menurut OECD (2021) pandemi menyebabkan terjadinya *learning loss* dan meningkatnya kesenjangan capaian belajar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa sistem pendidikan nasional membutuhkan pendekatan kurikulum yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap perubahan situasi. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah meluncurkan Kurikulum Merdeka Belajar.

Menurut Makarim (2022) Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang pembelajaran. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan memulihkan pembelajaran pascapandemi, tetapi juga mendorong transformasi paradigma pendidikan menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang terjadi dalam konteks yang spesifik. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan wawasan yang lebih luas mengenai persepsi, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh subjek penelitian terhadap peristiwa atau situasi yang sedang diteliti. Pendekatan utama yang digunakan adalah observasi, yang bertujuan untuk memahami bagaimana upaya pengembangan diversitas murid diterapkan di sekolah tersebut.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi kelas, dan dokumentasi program-program yang berfokus pada pengembangan diversitas murid. Wawancara dilakukan dengan guru, siswa, dan kepala sekolah untuk menggali perspektif mereka tentang bagaimana keberagaman dipromosikan dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran.

Selain itu, dilakukan juga analisis sosial untuk memahami interaksi sosial yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Langkah-langkah analisis meliputi pengkodean data, identifikasi tema-tema utama terkait dengan pengembangan diversitas, serta interpretasi mengenai dampak dari kebijakan dan praktik yang diterapkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kurikulum Merdeka sebagai Respons Kebijakan Pascapandemi

Kurikulum Merdeka diperkenalkan sebagai respons atas krisis pembelajaran pascapandemi. Menurut Kemendikbudristek (2022) kurikulum ini bertujuan mendukung pemulihan pembelajaran melalui penyederhanaan struktur kurikulum. Jadi, penyederhanaan ini merupakan langkah realistis untuk mengembalikan fokus pembelajaran pada kompetensi esensial.

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan variasi yang cukup besar antar satuan pendidikan. Perbedaan kesiapan sumber daya dan dukungan kebijakan menyebabkan kualitas implementasi belum merata. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas kurikulum perlu diiringi dengan kebijakan afirmatif bagi sekolah yang kurang siap.

### 2. Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Guru merupakan aktor utama dalam implementasi kurikulum. Menurut Suryaman (2022) keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kompetensi dan pemahaman guru. Kebebasan yang diberikan Kurikulum Merdeka justru menjadi tantangan bagi guru yang belum terbiasa dengan pembelajaran reflektif dan kontekstual. Beban administrasi dan keterbatasan pelatihan juga menjadi hambatan. Jadi, meskipun pemerintah menyediakan pelatihan mandiri, pendampingan langsung dan berkelanjutan masih sangat dibutuhkan agar transformasi kurikulum berjalan efektif.

### 3. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar

Platform Merdeka Mengajar (PMM) dirancang sebagai sarana pendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Menurut Kemendikbudristek (2022) PMM menyediakan pelatihan, perangkat ajar, dan inspirasi praktik baik.

Secara konseptual PMM merupakan inovasi yang relevan dengan transformasi digital pendidikan. Namun, pemanfaatan PMM masih menghadapi kendala literasi digital dan infrastruktur. Jadi, tanpa pemerataan akses teknologi, platform digital berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan.

### 4. Asesmen Diagnostik sebagai Fondasi Pembelajaran (DIPERBESAR)

Asesmen diagnostik merupakan komponen kunci dalam Kurikulum Merdeka. Menurut Kemendikbudristek (2023) asesmen diagnostik digunakan untuk memetakan kemampuan awal dan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen diagnostik mengubah paradigma asesmen dari evaluasi hasil menjadi dasar perencanaan pembelajaran.

Dalam konteks pascapandemi, asesmen diagnostik menjadi sangat penting karena heterogenitas kemampuan siswa semakin tinggi. Jadi, tanpa pemetaan awal yang akurat, pembelajaran berisiko tidak relevan dan tidak adil bagi peserta didik.

Namun, implementasi asesmen diagnostik masih menghadapi berbagai kendala. Seperti halnya yang di katakan Suryaman (2022) sebagian guru masih memahami asesmen diagnostik sebagai tes akademik semata.

Jadi, pemahaman ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas guru agar asesmen diagnostik benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Selain aspek kognitif, asesmen diagnostik juga mencakup aspek non-kognitif., aspek ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan belajar siswa, namun sering kali belum menjadi perhatian utama dalam praktik pembelajaran.

#### **5. Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka**

Pembelajaran berdiferensiasi merupakan tindak lanjut dari asesmen diagnostik. Menurut Tomlinson (2014) diferensiasi bertujuan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Pendekatan ini relevan dengan realitas kelas yang heterogen, namun membutuhkan kompetensi pedagogik yang tinggi.

Keterbatasan jumlah siswa dan waktu pembelajaran menjadi tantangan utama. Kebijakan diferensiasi harus diiringi dengan dukungan struktural agar dapat diterapkan secara realistis.

#### **6. Implementasi Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)**

Di perguruan tinggi, kebijakan MBKM memberikan fleksibilitas belajar lintas program studi. Menurut Dirjen Dikti (2022) MBKM bertujuan meningkatkan kesiapan kerja lulusan. MBKM merupakan inovasi penting untuk menjembatani dunia akademik dan dunia kerja.

Namun, implementasi MBKM masih menghadapi kendala administratif dan kesenjangan antar perguruan tinggi, kebijakan ini masih memerlukan penguatan regulasi dan pendampingan agar prinsip keadilan dan pemerataan dapat terwujud.

### **KESIMPULAN**

Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang relevan dengan tantangan pendidikan nasional pascapandemi dan tuntutan abad ke-21. Kurikulum ini menawarkan fleksibilitas pembelajaran, penguatan kompetensi esensial, serta pemanfaatan asesmen diagnostik sebagai dasar perencanaan pembelajaran. Meskipun Kurikulum Merdeka memiliki landasan konseptual yang kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru, pemerataan sarana prasarana, dan pendampingan kebijakan yang berkelanjutan. Optimalisasi asesmen diagnostik dan pembelajaran berdiferensiasi menjadi kunci utama agar Kurikulum Merdeka Belajar benar-benar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2022). *Panduan implementasi kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). *Panduan asesmen diagnostik pada Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Makarim, N. A. (2022). *Merdeka belajar: Transformasi pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

OECD. (2021). *The state of global education: Learning loss during the COVID-19 pandemic*. Paris: OECD Publishing.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryaman, M. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 7(2), 123–135.

Tilaar, H. A. R. (2012). *Kebijakan pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD.